

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat desa merupakan suatu organ pemerintah di desa, dibawah kepemimpinan kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU desa, kedudukan perangkat desa adalah “pembantu” bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan indonesia, “pembantu” juga dilekatkan kepada wakil presiden dan menteri-menteri. Perangkat desa diatur dalam pasal 48-53 undang-undang desa, kesimpulan pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas.

Undang-Undang tersebut diatur secara jelas bahwasanya pemerintah membutuhkan dukungan dari perangkat desa yang tangguh, profesional, dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah desa sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan ketentuan undang-undang desa, mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga masyarakat desa, aparatur desa melakukan pembinaan, pembangunan desa, dan membina perekonomian masyarakat desa. masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan perangkat pemerintah desa yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.

Perangkat desa yang ada di tengah-tengah masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa merupakan subsistem dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil, guna sesuai dengan perkembangan pemerintah. Seiring dengan fungsi dan tugas yang begitu besar perangkat desa mau tidak mau harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparatur desa harus dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai suatu keinginan masyarakat. sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *Human Capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi. Keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksana yang menjalankan lembaga atau motor penggerak organisasi. Selain para perangkat desa sering kali di sebut sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adanya fenomena bahwa seorang Sekretaris Desa (sekdes) di isi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), ketika ada pergantian kepala desa sekertaris desa sulit untuk di gantikan

dikarenakan sekertari desa yang nantinya menjadi pengganti belum tentu lagi mendapatkan gelar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh kepala desa. Yang mana sistem pengangkatan perangkat desa ini diambil dari orang yang terdekat dengan kepala desa bukan diambil dari orang yang mempunyai kemampuan dibidang pengelolaan pembangunan atau pelayanan. Idialnya pengangkatan perangkat desa harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan. Sehingga kinerja para Aparatur desa bisa lebih baik dan bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini Kegiatan dan pembangunan masyarakat di desa di *handle* oleh orang terdekat kepala desa dan operator desa. Sehingga pembinaan, pengayoman kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik yang menghambat kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat desa yang pada umumnya masih sangat awam sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, dan suport untuk lebih maju dari para aperatur desa, namun banyak masyarakat desa dikecamatan Kokop mmerasa kurang puas dan masih sering mengeluh tentang kinerja para aparatur desa yang kurang pengertian, kurang perhatian, kurang bimbingan pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit yang membingungkan masyarakat. Hal seperti itulah yang banyak terjadi di Desa di Kecamatan Kokop, adanya aperatur desa tidak berjalan dengan efektif hanya sekedar formalitas, tidak ada peran yang berarti dari aperatur Desa di Kecamatan Kokop untuk memperbaiki tingkat kemiskinan, perekonomian dan pendidikan. Aperatur Desa kurang memperdulika kebutuhan masyarakat, di sebagian desa ada struktural kepengurusan desa tetapi tidak ada orangnya.

Fenomena seperti itu yang banyak terjadi di kecamatan kokop, yang dapat menimbulkan tanda tanya bagi sebagian masyarakat, banyak yang berpendapat hal seperti itu setingan dari kepala desa setempat. Sesuai dengan perundang undangan di atas bahwa perangkat desa ibaratkan seorang mentri dipemerintahan pusat, apabila mentrinya tidak jalan maka roda pemerintahan itu juga tidak akan berjalan.

Masyarakat butuh pengayoman, masyarakat butuh bimbingan dari aperatur desa untuk masa depan yang lebih cemerlang. Perangkat desa merupakan aperatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, namun ketika kinerja perangkat desanya kurang baik maka kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai. Pemerintah desa di bawah pimpinan kepala desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, pemerintah desa menjalankan fungsi administrasi pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat.

Aparatur desa mendapatkan amanat dari pemerintah pusat untuk merubah pemikiran masyarakat untuk lebih maju, baik dalam pemikiran dan pekerjaan. Aparatur desa merupakan organisasi yang paling dekat dan saling bersentuhan langsung dengan tingkatan masyarakat di desa, akan tetapi kebanyakan dari mereka membatasi ruang lingkup ke pemerintahannya sehingga banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya masih kebingungan. Rendahnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat baik secara kualitas

maupun kuantitas masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping karena kualitas, juga karena tidak semua perangkat desa mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga mereka berjalan tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kurang kinerja aperatur pemerintah desa menyebabkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Kokop menjadi yang terbesar di bandingkan dengan Kecamatan lain, Kokop menjadi kecamatan yang sangat tertinggal. Selama ini kecamatan Kokop terkenal dengan kecamatan tertinggal, sesuai dengan data yang di peroleh penulis dari badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten bangkalan tahun 2012 sebanyak 88,88% masyarakat di Kecamatan Kokop berada di garis kemiskinan.

Tabel: 1.1 Jumlah Kepala Keluarga , Keluarga Miskin dan Persentasenya 2012

Kode	Kecamatan	Kepala Keluarga	Jumlah Gakin	Persentase
010	Kamal	11.219	3.126	27,86 %
020	Labeng	10.838	5.869	54,15 %
030	Kwanyar	14.085	9.157	65,01 %
040	Modung	12.903	9.131	70,77 %
050	Blega	16.238	13.248	81,59 %
060	Konang	11.164	9.805	87,83 %
070	Galis	17.867	11.797	66,03 %
080	Tanah Merah	17.344	11.765	67,83 %
090	Trageh	8.003	4.667	58,32 %
100	Socah	15.451	7.114	46,04 %
110	Bangkalan	18. 303	3.551	19,40 %
120	Burneh	12.875	3.166	24,59 %
130	Arosbaya	11.409	2.142	18,77 %
140	Geger	18.415	12.625	68,56 %
150	Kokop	12.361	10.987	88,88 %
160	Tanjung Bumi	13.797	7.096	51,43 %
170	Sepuluh	12.175	9.092	59,43 %
180	Kelampes	16.378	9.734	57,44 %
Jumlah Total		250,825	144,072	57,44

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2012

Dari data tersebut patutnya kita bertanya ada apa dengan pemerintahan di desa di Kecamatan Kokop sehingga tingkat kemiskinan sampai mencapai 88,88%, dengan kata lain mayoritas penduduk di Kecamatan Kokop berada di bawah garis kemiskinan. Ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui bersama, karna kalau hal ini di biarkan berlarut-larut maka selamanya tidak akan ada yang namanya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kokop.

Dengan temuan tersebut peneliti sangatlah tertarik mengadakan penelitian dari aparat pemerintah yang paling bawah yaitu Aparatur Desa, karena ketika berbicara masyarakat tidak akan terhindar dengan yang namanya aparat/perangkat Desa. Aparatur pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di bawah komando kepala desa. Yang akan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat untuk lebih mempunyai semangat dan bisa bersama-sama membangun desa untuk kesejahteraan bersama.

Dari hasil observasi sementara, aparat desa banyak mengeluhkan dengan sistem kepemimpinan dari kepala desa. Para aparat desa kurang mengetahui tentang tugas-tugas mereka menjadi perangkat desa, para perangkat desa tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari kepala desa sebelum mereka aktif berdin. Idialnya seorang perangkat desa sebelum aktif berdin itu mereka diberikan pembekalan tentang tugasnya masing-masing sehingga mereka mengetahui tentang tugasnya masing-masing. untuk menghasilkan kinerja perangkat desa yang optimal pemimpin harus mampu mengarahkan perangkat desanya untuk bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat.

Apratur desa di Kecamatan Kokop merupakan seorang yang tidak mempunyai pekerjaan lain, mereka tidak memiliki masukan lain untuk menafkahi keluarganya. Sehingga mereka membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah khususnya di sistem pemberian gaji, untuk saat ini gaji yang mereka dapat sangatlah kurang ketimbang dengan kebutuhan hidup yang mereka harus jalani, mereka disamping menjadi perangkat desa juga sering mencari pekerjaan sampingan membuat mereka lalai akan tugas sebagai perangkat desa. Mereka beranggapan untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja kurang apalagi mau memenuhi kebutuhan orang, itulah pemikiran perangkat desa yang sering di dengar oleh penulis.

Selain sistem gaji yang mereka terima kurang mencukupi kebutuhannya, Kebanyakan desa di Kecamatan Kokop belum mempunyai kantor desa yang permanen, kantor desa yang ada kebanyakan masih menjadi satu dengan kediaman kepala desa. Hal seperti ini terjadi hampir di semua desa di Kecamatan Kokop, sehingga perangkat desa merasa sungkan dan bingung untuk bekerja, mereka pun juga tidak tahu dimana mereka harus bekerja. Kebutuhan kantor desa yang nyaman sangatlah dibutuhkan oleh semua Perangkat Desa, karna dengan adanya kantor yang nyaman tentram akan membuat para Perangkat Desa nyaman dalam bekerja.

Kantor desa yang baik dan bagus bukan Cuma hanya dibutuhkan oleh aperatur desa namun masyarakat juga sangat membutuhka, Mereka bisa tahu dimana tempatnya mereka minta bantuan. Namun ketika kantor desa dengan rumah kepala desa menjadi satu maka masyarakat untuk datang ke kantor desa akan merasa sungkan dan malu untuk datang ke kantor desa. Kantor desa juga bisa di manfaatkan halamannya oleh masyarakat untuk bisa berkumpul,

berdiskusi dengan para aperatur desa atau dengan sesama masyarakat tanpa ada rasa sungkan.

Fakta yang seperti itulah yang terjadi di lapangan. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian Aperatur desa di kecamatan Kokop. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan kinerja aperatur desa di Kecamatan Kokop kurang baik. Menurut Simanjuntak banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, namun Untuk penelitian kali ini peneliti mengambil faktor kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, dan pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama kurangnya kinerja perangkat desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Sehingga peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

4. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
5. Apakah variabel kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, dan pendidikan dan pelatihan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
6. Diantara beberapa faktor yaitu kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, dan pendidikan dan pelatihan, variabel manakan yang berpengaruh dominan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja aparatur desa di kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, dan pendidikan dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

6. Untuk mengetahui faktor yaitu kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, dan pendidikan dan pelatihan, variabel yang dominan yang mempengaruhi kinerja aparatur desa dikecamatan Kokop kabupaten Bangkalan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkait, yaitu:

1. Peneliti

Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan kesiapan bila nantinya terjun ke dunia kerja dan memperluas pengetahuan terutama yang berhubungan antara kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan.

2. Bagi Kepala Desa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan informasi dan motivasi sebagai masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur desa.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai kompensasi, lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, dan kepemimpinan terhadap kinerja aparatur desa.

4. Bagi Peneliti Lanjutannya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja aparatur desa.